

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENDAHULUKAN NAFKAH
KEPADA ORANG LAIN DAN MENGABAIKAN NAFKAH
ISTRINYA SENDIRI
(Studi kasus Pada Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning
Lampung Utara)**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
mendapatkan gelar sarjana dalam ilmu Ahwal al-Syakhsyah

Oleh :

FATIMAH AZZAHROH

NPM : 1621010142

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENDAHULUKAN NAFKAH
KEPADA ORANG LAIN DAN MENGABAIKAN NAFKAH
ISTRINYA SENDIRI
(Studi kasus Pada Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning
Lampung Utara)**

Skripsi

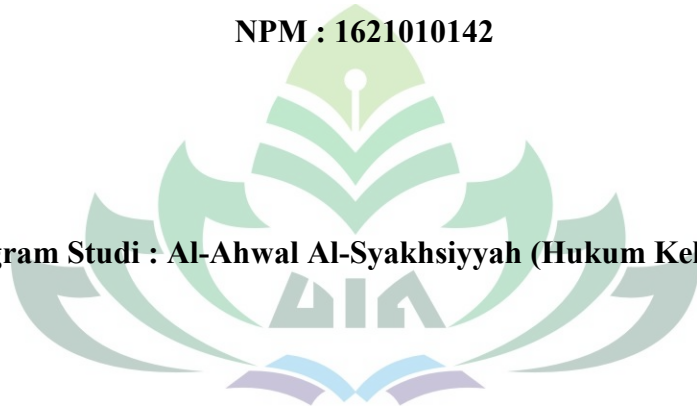
Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
mendapatkan gelar sarjana dalam ilmu Ahwal al-Syakhsyah

Oleh :

FATIMAH AZZAHROH

NPM : 1621010142

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)



Dosen Pembimbing I

: Dr. Hj. Linda Firdawaty. S.Ag., M.H

Dosen Pembimbing II

: Dr. Gandhi Liyorba, S. Ag., M. Ag

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Namun tidak banyak pula yang melalaikan tugasnya dalam pemberian nafkah terhadap pasangan dan keluarganya. Adapun yang terjadi terkait suami yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah, bahkan lebih mementingkan pemberian nafkah terhadap orang lain seperti yang terjadi di Kecamatan Bukit Kemuning. Sehingga tidak jarang permasalahan dalam rumah tangga yang mampu terelakkan lagi. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang kewajiban pemberian nafkah terhadap istri dan anak. Oleh karena itu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa motivasi suami mendahulukan nafkah kepada orang lain dan mengabaikan nafkah istri sendiri dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tindakan mendahulukan nafkah kepada orang lain dan mengabaikan nafkah istri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi suami mendahulukan nafkah kepada orang lain dan mengabaikan nafkah istri sendiri dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tindakan mendahulukan nafkah kepada orang lain dan mengabaikan nafkah istri. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu keluarga yang suaminya mendahulukan nafkahnya kepada orang lain dan mengabaikan nafkah istrinya sendiri. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa motivasi suami mendahulukan nafkah kepada orang lain dan mengabaikan nafkah istri sendiri dikarenakan merasa kasian kepada janda anak satu dan merasa bahwa istrinya memiliki pekerjaan tetap. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap tindak mendahulukan nafkah kepada orang lain dan mengabaikan istrinya sendiri tidak di perbolehkan dalam Islam.

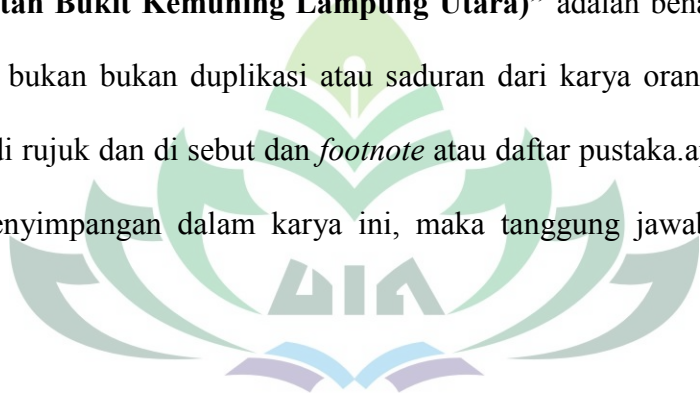
Hukum Islam membolehkan suami memberikan nafkah kepada orang lain sepanjang suami telah memenuhi nafkahnya kepada istri dan anaknya. Tetapi jika suami lebih mendahulukan nafkah kepada orang lain dan istri tidak rela maka berdosa suami karena melalaikan kewajiban nafkah. Mendahulukan nafkah kepada orang lain dan tidak menafkahi istrinya maka, pihak istri bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama. Kesimpulannya adalah nafkah merupakan kewajiban suami yang harus di berikan kepada istri, jika suami lebih mendahulukan nafkah nya kepada orang lain daripada istrinya dengan alasan kasihan kepada janda tersebut karena janda itu mempunyai anak dan janda tersebut miskin dengan tujuan hanya membantu maka dalam hukum Islam tidak di perbolehkan terkecuali suami sudah memberikan kewajiban nafkah kepada istri dan anaknya dan sang istri rela maka diperbolehkan. Namun apabila suami melalaikan kewajiban nafkah kepada istrinya maka istri berhak menuntut haknya dalam tanggung jawab dan kewajibannya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatimah Azzahroh
Npm : 1621010142
Jurusan : *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* (Hukum Keluarga)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mendahulukan Nafkah Kepada Orang Lin dan Mengabaikan Nafkah Istrinya Sendiri (Studi Di Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara)**” adalah benar-benar hasil karya peenyusun sendiri, bukan bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan di sebut dan *footnote* atau daftar pustaka.apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.



Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung 19 Agustus 2020

Penulis,

Fatimah Azzahroh

1621010142



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : Fatimah Azzahroh

NPM : 1621010142

Jurusan : Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Fakultas : Syari'ah

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
MENDAHULUKAN NAFKAH KEPADA ORANG LAIN
DAN MENGABAIKAN NAFKAH ISTRINYA SENDIRI
(Studi kasus Pada Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit
Kemuning Lampung Utara)**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H
NIP.197112041997032001

Dr. Gandhi Livorba, S.Ag., M.Ag
NIP. 197504282007101003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga**

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENDAHULUKAN NAFKAH KEPADA ORANG LAIN DAN MENGABAIKAN NAFKAH ISTRINYA SENDIRI (Studi kasus Pada Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara)**. disusun oleh: **Fatimah Azzahroh NPM: 1621010142** Program Studi: **Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)** telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: **Rabu, 27 Januari 2021**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....)

Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I (.....)

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji III : Dr. Ghandhi Liyorba Indra, M.Ag. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H
NIP. 196210221993031002

MOTTO

لِيُنْفِذُوا سَعَاهُ مِمَّنْ سَعَيْتَ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

يُكَأَلُ لِلَّهِ نَفْسًا لَا آتَاهَا سَيِّجَعَلْ آدَمُ . بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا 7

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Talaq-7)



PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabilalamin rasa syukurku kepada Allah swt. Yang telah mempermudah serta memberi aku kelancaran mengerjakan hasil karya ini, dan aku persembahkan rasa terimakasihku kepada orang-orang yang telah membantuku serta do'a yang selalu diberikan.

1. Terimakasih kepada Ibu (Rusiyem) dan Bapak (Turmudi) yang selalu memberiku semangat, atas kerja keras Ibu dan Bapak aku dapat menyelesaikan studiku, dan dengan doa yang selalu kalian haturkan, semoga allah selalu senantiasa memberikan Ibu dan Bapak kesehatan ,panjang umur. Semoga Fatimah menjadi anak yang bisa menjadi kebanggan Ibu dan Bapak.
2. Terimakasih kepada Adik-adik perempuanku (Uswatun Hasanah dan Eni Masruroh), yang selalu memberiku semangat dalam mengerjakan hasil karya ini.
3. Terimakasih kepada Almamaterku Kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Fatimah Azzahroh, lahir di Sinar Jawa pada tanggal 19 bulan Desember tahun 1998, anak pertama dari tiga bersaudara yang dari pasangan Ibuk Rusyem dan Bapak Turmudi. Pendidikan yang pernah ditempuh yaitu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Sinar Jawa, kecamatan Air Naningan Lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan sekolah di SMP N 1 Air Naningan, diselesaikan pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke MA Diniyyah Putri Lampung, dan di selesaikan pada tahun 2016. lalu melanjutkan Pendidikan mengambil Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan *al-Ahwal al-Syakhsiyyah* (Hukum Keluarga Islam) Tahun Akademik 2016-2020.



Bandar Lampung, 04 Juni 2020
Yang Membuat,

Fatimah Azzahroh
NPM. 1621010142

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mendahulukan Nafkah Kepada Orang Lain dan Mengabaikan Nafkah Istrinya Sendiri Studi di Desa Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Lampung Utara)”**. Karya Ilmiah ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga Islam di UIN Raden Intan Lampung.

Shalawat serta salam semoga Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang selalu melanjutkan dakwah beliau sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai tugas serta persyaratan untuk menyelesaikan studi program (S1) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana (S.H). Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak-pihak , oleh karena itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Rohmat, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah.
4. Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. yang sudah membimbingku dengan sabar serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pembimbing II Bapak Dr. Gandhi Liyorba, S. Ag., M.Ag yang sudah membimbingku dengan sabar serta mengoreksi skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah terutama Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu-ilmunya.
7. Kedua Orang tuaku yang selalu mendoakan disetiap aku melangkah, memberiku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, bersimbah keringat untuk membantuku dalam pendidikan.
8. Kedua Adikku yang selalu memberikan semangat dan mendoakan ku dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teimakasih kepada sahabat-sahabatku Tersayang Dira Yanti, Listia Febriyani, Indah Trisnawati, Hana Fauziah, Resti Agustina, Isaora Astiningsih, Yayang irena, Desma Rizki, Salma Dhia Syafitri, Ayu Anggreini, Diana Amelia Feni yang telah membantu mengerjakan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Tim Basket UIN Raden Intan Lampung dan Dt. United Lampung .
11. Terimakasih kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas C.

12. Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku Hukum Keluarga Islam Angkatan Tahun 2016 yang semangat dan berhasil dalam meraih gelar S.H di kondisi Covid-19 ini.

Semoga kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapatkan imbalan yang lebih dari Allah swt. Saya mengaku bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Karena keterbatasan dan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk itu kritik dan sarannya yang dapat menyempurnakan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca.

Aamiin ya Rabbal'alamin.

Bandar Lampung, 04 september 2020

Penulis,



Fatimah Azzahroh
NPM.1621010142

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Signifikan Penelitian	10
H. Metode penelitian.....	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga.....	16
1. Kewajiban suami terhadap istri	17
2. Kewajiban istri terhadap suami.....	20
3. Hak Bersama suami istri	23
4. Kewajiban Bersama suami istri.....	23
B. Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Nafkah.....	24
2. Dasar Hukum Nafkah.....	26

3. Syarat Istri Mendapatkan Nafkah.....	29
4. Gugurnya Hak Nafkah	30
5. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah	33
6. Macam-macam Nafkah	35
7. Ukuran Nafkah	37
8. Tujuan dan Hikmah.....	39
C. Tinjauan Pustaka	39

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Bukit Kemuning.....	43
1. Sejarah Desa Bukit Kemuning.....	43
2. Visi dan Misi	44
B. Letak Geografis.....	46
C. Kondisi demografis.....	47
D. Potret Keluarga Objek Penelitian.....	57

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Apa Motivasi Mendahulukan Nafkah Kepada Orang Lain dan Mengabaikan Nafkah Istrinya Sendiri	62
B. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mendahulukan Nafkah Kepada Orang Lain dan Mengabaikan Istrinya Sendiri	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Konsultasi
- Lampiran 2 Surat Izin Riset
- Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 4 Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 Turnitin
- Lampiran 6 Dokumentas

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mendahulukan Nafkah Kepada Orang Lain dan Mengabaikan Nafkah Istri Sendiri** (Studi Kasus di Desa Bukit Kemuning Lampung Utara)”. Untuk itu penulis perlu menjelaskan judul skripsi ini agar terhindar dari kesalahan dalam menafsirkan serta untuk mengarahkan penulis agar sesuai dengan tujuan penulisan tersebut. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat yakni (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang di bangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun as-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada zaman dan tempat manusia.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 951.

² Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009).

3. Nafkah

Yang di maksud dengan Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian , rumah dan lain-lain.³

4. Mengabaikan

Mengabaikan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak dipedulikan (tidak di kerjakan dengan baik-baik dan tidak di pentingkan) dan lalai.⁴

Jadi yang di maksud penulis dari judul skripsi di atas adalah untuk melakukan tinjauan menurut Hukum Islam terhadap tindakan mendahulukan nafkah kepada orang lain dan mengabaikan nafkah istri sendiri.

B. Alasan Memilih Judul

Sebagai alasan yang mendorong penulis dalam memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mendahulukan Nafkah Kepada Orang Lain dan Mengabaikan Nafkah Istri Sendiri.”adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif

Lazimnya suami itu yang memberikan nafkah kepada istri namun dijumpai suatu kasus ada seorang suami yang memberikan sebagian besar nafkahnya kepada wanita lain.

³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2004),h.383

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,2007)

2. Secara Subjektif

Judul tersebut sesuai disiplin ilmu yang penulis tempuh sebagai mahasiswa di jurusan Ahwal Al-Syakhsyah yang meliputi hukum keluarga dimana Hukum Perkawinan Islam adalah bagian dari kajian perkuliahan. Serta adanya pendukung dalam bagian skripsi ini. Seperti tersedianya sumber referensi dan literatur sebagai bahan rujukan penelitian.

C. Latar Belakang

Perkawinan adalah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan hidup di tengah lingkungan masyarakat. Perkawinan itu bukan hanya merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunannya, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya. Perkenalan itu menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.⁵

Pada hakikatnya akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara suami dan isteri saling kasih mengasihi akan berpindah untuk semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013),h.374

dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan perkawinan seorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.⁶ Setiap orang ingin memasuki kehidupan berkeluarga melalui perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu perintah Agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.⁷

Perkawinan bukan hanya menyatukan dua manusia berpasang-pasangan melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terwujudnya keluarga yang tentram, sakinah tidak cukup hanya bersandar pada ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bersifat global, tetapi juga berkaitan dengan hukum suatu Negara. Perkawinan dinyatakan sah jika menurut hukum Islam dan Negara telah memenuhi rukun dan syaratnya.⁸ Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka timbulah akibat hukum yang menimbulkan pula hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga. Hak dan kewajiban inilah yang harus diterima dan dilakukan oleh keduanya. Jika hak dan kewajiban ini dijalankan dengan baik dan benar serta tulus, maka perkawinan itu menjadi keluarga yang harmonis dan langgeng.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung; Pustaka Setia, 2013), h.11-12

⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.7

⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.19

Selain adanya hak dan kewajiban suami dan isteri, seorang laki-laki dan perempuan yang telah melakukan pernikahan, maka tanggung jawab seorang perempuan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab dari orang tua beralih menjadi tanggung jawab suami. Adapun pembahasan tentang hak dan kewajiban rumah tangga dalam Islam dibagi menjadi tiga aspek, yaitu hak isteri yang wajib dipenuhi oleh sang suami (kewajiban suami yang harus dipenuhi isteri), hak suami yang wajib dipenuhi oleh isteri (kewajiban isteri yang dipenuhi oleh suami), dan hak bersama yang harus dipenuhi oleh keduanya. Hak dan kewajiban yang timbul antara suami dan istri harus dipertanggung jawabkan antara keduanya.⁹ Suami bertanggung jawab terhadap istrinya dan istri bertanggung jawab terhadap suami. Tanggung jawab dimulai dari yang terkecil yaitu keluarga kemudian meningkat lebih luas lagi.¹⁰

Hak dan kewajiban suami-istri dalam Undang-Undang perkawinan diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34, yaitu :

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

⁹ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan di Kota Padang)*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), h. 86

¹⁰ M. Hasan Ali, *Masail fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h.6

3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
4. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga
5. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah tempat kediaman ini di tentukan secara bersama-sama.
6. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
8. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baik nya.
9. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan di pengadilan.¹¹

Orang yang sudah terbiasa dan terlatih melakukan tanggung jawab dalam suatu rumah tangga, biasanya akan sukses pula dalam masyarakat. Kendatipun ada sebagian kecil yang bertanggung jawab dan sukses mengemban tugas dalam masyarakat, tetapi tidak sukses dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga.¹² Tanggung jawab yang harus dilakukan suami salah satunya adalah mengenai nafkah yang harus dipenuhi untuk keluarga. Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah untuk para suami, baik masih dalam hubungan suami dan istri, atau sudah di ceraikan selama sang isteri masih dalam masa iddah.

¹¹Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016),h. 42

¹²*Ibid.*, h. 7

Nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karna kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan nafkah menurut ulama adalah belanja untuk keperluan makan dan mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari di sebut sandang, pangan, dan papan.¹³ Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan Al-Qur'an mewajibkan hal itu dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ (البقرة: 233)

Artinya: *Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seorang tidak di bebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak mendapat kesusahan karena anaknya.*¹⁴

Dalam kitab *Syarhas-Sunnah* dikatakan, “Di dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa jika seorang suami pergi meninggalkan istrinya, maka tidak gugur kewajibannya memberikan nafkah. Jika ia tidak memberikan nafkah dalam waktu tertentu, maka nafkah itu menjadi hutang bagi dirinya. Hal itu merupakan pendapat Imam Syafi’I. Para penganut mazhab Hanafi berpendapat bahwa nafkah kepada istri itu tidak menjadi

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 166

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Hidayah Surabaya, 1971), h. 57

hutang selama tidak diwajibkan oleh hakim. Jika pihak istri yang pergi tanpa seizin suaminya maka kewajiban nafkahnya gugur.¹⁵

Jika sang istri menjalankan kewajibannya dengan baik dan suami juga menjalankan kewajibannya dengan baik maka terciptalah keluarga yang harmonis. Jika para suami tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan lebih memilih mendahulukan nafkah orang lain dan tidak memberikan nafkah terhadap istrinya karna sang istri lebih mempunyai penghasilan yg layak bagi anak-anaknya maka tindakan ini tidak di benarkan oleh hukum.

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah adalah mutlak dilaksanakan apakah istri memintanya atau tidak, dalam kasus di Desa Bukit Kemuning Lampung Utara bahwa istri tidak di nafkahi dan suami lebih mendahulukan nafkah kepada orang lain dikarenakan kasihan kepada janda anak satu tersebut. Istri sama-sama bekerja dan lebih memiliki penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan suami sehingga keberadaan istri yang bekerja dan berpenghasilan lebih dari suaminya ini hingga membuat suami tidak memberikan nafkah terhadap sang istri dan mengabaikan nafkah istrinya dan lebih mengutamakan nafkah terhadap orang lain.

Dari penjelasan di atas serta permasalahan yang terjadi di masyarakat ini menarik untuk mengkajinya, oleh karena itu penulis bermaksud meneliti

¹⁵ Ayyub Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2004), h.385-

permasalahan di atas dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENDAHULUKAN NAFKAH KEPADA ORANG LAIN DAN MENGABAIKAN ISTRI SENDIRI” (Studi Kasus di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara).**

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah apa motivasi suami mendahulukan nafkah kepada orang lain dan mengabaikan nafkah istrinya sendiri. Kemudian bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap mendahulukan nafkah orang lain dan mengabaikan nafkah istrinya sendiri.

E. Rumusan Masalah

1. Apa motivasi suami mendahulukan nafkah kepada orang lain dan mengabaikan nafkah istri sendiri pada keluarga di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap mendahulukan nafkah kepada orang lain dan mengabaikan nafkah istri ?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik mendahulukan nafkah terhadap orang lain dan mengabaikan nafkah istrinya pada keluarga di Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara .

2. Untuk mengetahui bagaimana tindak mendahulukan nafkah terhadap orang lain dan mengabaikan nafkah istrinya sendiri menurut Hukum Islam.

G. Signifikansi penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari pembahasan skripsi ini yaitu :

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai mendahulukan nafkah kepada orang lain dan mengabaikan nafkah istrinya sendiri.
2. Secara praktis diharapkan peneliti ini dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai mendahulukan nafkah kepada orang lain dan mengabaikan nafkah istrinya sendiri dalam tinjauan Hukum Islam.
3. Sebagai tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.

H. Metode penelitian

Penggunaan suatu metode adalah keharusan dalam penelitian agar validitas data bisa di capai. Dalam penelitian ini di gunakan metode pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. Namun, sebelum sebelum memaparkan ketiga metode tersebut , peneliti akan menguraikan dahulu sifat dan jenis penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan (daerah tempat penelitian), untuk memperoleh data tentang mendahulukan nafkah kepada orang lain dan mengabaikan nafkah istri sendiri studi di Kecamatan Bukit Kemuning.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, karena bertujuan untuk memuat informasi secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta.¹⁶

2. Sumber Data

Dalam jenis penelitian ini data-data yang dijadikan acuan bersumber dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang memberikan data langsung dari tangan pertama atau sumber data yang asli tidak melalui media perantara.¹⁷ Dalam hal ini sumber data ini diperoleh dari lapangan yakni wawancara dengan

¹⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.

¹⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.

keluarga yang suaminya mendahulukan nafkahnya kepada orang lain dan mengabaikan nafkah istri di Desa Bukit Kemuning Lampung Utara. Suami yang mempunyai pekerjaan sebagai penjual kacangata keliling melihat janda anak satu tersebut merasa kasihan dan memberikan sedikit uangnya kepada janda anak satu tersebut karena merasa kasihan. Akan tetapi sang istri tidak mengetahui hal ini dan memberikan uang tersebut secara diam-diam. Artinya dalam konteks ini bahwa sumber data tersebut kemudian dijadikan acuan utama karena mengandung data-data penting. Dalam hal ini yang harus ditelaah dan menjadi rujukan adalah literature asli Al-Qur'an, kitab, buku-buku tentang nafkah yang berhubungan dengan pembahasan pembahasan nafkah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan yang menjelaskan sumber data primer yaitu, seperti hasil penelitian pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil karya ilmiah.¹⁸

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder. Penelusuran tersebut di ambil dari sumber data primer, sumber data sekunder, seperti kamus,

¹⁸S.a Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), h. 26

ensiklopedia, dan beberapa jurnal hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data , diantaranya yaitu: metode interview, metode observasi , dan metode dokumentasi.

a. Metode interview

Menurut S. Margono, metode interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk di jawab secara lisan juga. Metode interview ini dalam penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan terhadap seseorang yang berkaitan dengan pembahas skripsi ini.

b. Metode Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan sistematis mengenai fenomena social, dan dilaksanakan pencatatan. Jadi, metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data yang di lakukan dengan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dari suatu objek yang di selidiki.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹⁹

4. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian di olah . Pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan Data (Editing) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Rekontruksi Data (Reconstructing) yaitu, menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah di pahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematisasi Data (sistemaziting) yat, menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasar kan urutan masalah.²⁰

5. Metode Analisis data

Untuk dapat mencegah masalah yang di teliti di lakukan tahap analisa data. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa agar berhasil

¹⁹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), h. 202

²⁰ AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, *Ibid.*,h. 126.

menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden (pelaku tindak mendahulukan nafkah kepada orang lain dan mengabaikan nafkah istrinya) secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.²¹

Adapun metode analisis data yang di pakai dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Induktif, adalah pola pemikiran peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari kasus dan konkrit tadi digeneralisasi yang bersifat umum.²² Metode ini di gunakan untuk menjelaskan dan menguji kembali validitas kesimpulan sub pokok pembahasan penelitian yang telah disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif.

²¹Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press. 1986) h. 250

²²*Ibid.*,h. 76.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Hak Dan Kewajiban dalam Rumah Tangga

Yang dimaksud hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang di harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak juga. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat di lihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi.²³ Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah(2) ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (البقرة 228)

*Artinya: Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruh dan bagi suami setingkat lebih dari istri.*²⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakana dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan

²³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group), h. 159

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya Juz I-Juz 30*, (Jakarta: Al-Hidayah, 1998), h.55

suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan lebih tinggi setingkat, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.²⁵

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada tiga hal:

1. Kewajiban suami terhadap istrinya.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat di bagi kepada dua bagian:

- a. Kewajiban yang bersifat materi yang di sebut *nafaqah*.
- b. Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

- a. Menggauli istrinya secara patut dan baik. Hal ini sesuai dengan firman

Allah dalam surat an-Nisa' ayat 19 :

وَعَا شِرْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء : 19)

Artinya: "Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak padanya"²⁶

²⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, op.cit., h. 159

²⁶ Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, h.119

Yang dimaksud dengan pergaulan di sini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. bentuk pergaulan yang di katakana dalam ayat tersebut di istilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik; sedangkan bentuk yang makruf itu di jelaskan Allah secara khusu'. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Apa yang di paham juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatanya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

- b. Menjaganya dari segala sesuatu yang melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan marabahaya. Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama; dan menjauhkan istri dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memebrikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.
- c. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang di harapkan Allah, yaitu *mawaddah, rahmah, dan sakinah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum (30) Ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الزّوم : 21)

*Artinya: Diantara tanda-tanda kebesaran Allah Ia menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam,²⁸ kewajiban suami terhadap istrinya di jelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istrinya dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting di putuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan , pengobatan bagi istri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak.

²⁷ Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*.,h.644

²⁸ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995),h.132-133

- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

2. Kewajiban istri terhadap suami

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dan istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri. Kewajiban yang bersifat nonmateri itu yaitu:

- a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat di pahami dari ayat yang menurut suami menggauli istrinya dengan baik yang di kutip di atas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbale balik
- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya; dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat ar-Rum ayat 21 di atas, karena ayat itu ditunjuk kepada masing-masing suami istri.

- c. Taat dan patuh kepada suaminya selama tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.

Kewajiban mematuhi suami ini dapat di lihat dari isyarat firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (النِّسَاء : 34)

Artinya: Perempuan-perempuan yang saleh ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka.²⁹

Mematuhi suami di sini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang di larangnya, selama suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila suruhan atau larangannya itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya. Contohnya seperti suami meminta istrinya untuk berjudi. Tidak adanya kewajiban patuh kepada siapapun termasuk kepada suami yang menyuruh kepada maksiat dapat di pahami dari sabda Nabi:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

Artinya: Tidak ada kewajiban taat kepada siapapun bila di suruh untuk berbuatmaksiat kepada Allah.

- d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah. Hal ini dapat di pahami dari firman Allah di atas.

²⁹ Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*.,h.123

- e. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak di senangi oleh suaminya.
- f. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak di pandang dan suara yang tidak enak di dengar.

Kesemuanya ini dapat di lihat dari sabda Nabi dalam hadits dari Abu Hurairah menurut yang di keluarkan oleh al-Nasa-i:

قيل يا رسول الله أى النساء خير ؟ قال التى إن تسره إن نظر و
تطيعه إن امر و لا تخالفه فى نفسها وما لها بما يكره

Artinya: Nabi ditanya: “Ya Rasul Allah perempuan mana yang lebih baik?”. Nabi berkata: “bila suami memandangnya, ia menyenangkan suaminya; bila suami menyuruhnya, ia mematuhi; ia tidak menyalahi suaminya tentang diri dan hartanya tentang sesuatu yang tidak di senangnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Kewajiban istri terhadap suaminya dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang di benarkan oleh hukum islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³⁰

³⁰ *Ibid.*, h. 134

3. Hak Bersama Suami Istri

Yang di maksud dengan hak berrsama suami istri ini adalah hak bersama secara tibl balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:

- a. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
- b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang di sebut hubungan *mushaharah*.
- c. Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bla terjadi kematian.³¹

4. Kewajiban bersama suami istri.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah :

- a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.³²

³¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, op.cit.*, h. 163

³² *Ibid.*, h. 154

B. Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, kerna kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang di gunakan selama ini tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi di sebut nafkah lahir.

Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang ebsifat lahiriah atau materi. Kata nafkah yang berasal dari kata انفق dalam bahasa arab secara etimologi mengandung arti berkurang. Juga berarti فنى وذهب yang artinya hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan yang mengandung arti: “sesuatu yang di keluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istri sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. Dengan demikian, *nafaqah* istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istri dalam masa perkawinannya.

Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi pakaian, makanan, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.³³ Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istri yang berlaku dalam fiqih di dasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rizki, rizki yang telah diperoleh itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari nafkah dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.³⁴

Yang dimaksud dalam pengertian nafkah menurut yang di sepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam kesehariannya di sebut sandang, pangan, dan papan. Atas dasar Alqur'an, sunnah, ijma', dan dalil, para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: 7)

³³ Yayah Abdullah al- Khatib, *Ahkam al-Marrah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah*, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h.164

³⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, op.cit., h. 165-166

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Maksud ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, menurut kemampuannya. Jika ia termasuk orang yang mampu berikanlah kemampuannya. Dan jika orang yang terbatas rezekinya yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga di patrikan dengan bertaqwa kepada Allah.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, nafkah yaitu segala sesuatu yang mempunyai nilai materi dan nilai manfaat yang dapat diberikan suami kepada keluarganya sebagai rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

2. Dasar Hukum Nafkah

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk berbelanja pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh

karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan sang istri. Bahkan para ulama menetapkan bahwa walaupun istri kaya dan tidak memerlukan bantuan dari suami, namun suami wajib membayar nafkah. Dasar kewajiban nafkah itu sendiri dari Alqur'an maupun dari Hadits Nabi. Diantaranya dalam surat al-baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
(البقرة : 233)

*Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."*³⁵

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadi pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.³⁶

Dalam tafsir Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah

³⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, op.cit.*, h. 166

³⁶ Tihami dan sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 166

kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.³⁷ Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

Di antara ayat yang mewajibkan perumahan adalah surat at-Thalaq (65) ayat 6 :

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
(الطلاق: 6)

Artinya: Beri kediamanlah mereka (istri-istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi seorang suami memberi tempat tinggal yang layak kepada istrinya sesuai dengan kemampuan suaminya. Jangan sekali-kali berbuat yang menyusahkan dan menyempitkan hati isteri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.³⁸

Begitu pula hadist Nabi dari Hakim bin Muawwiyah al-Qusyairiy menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud, al-Nasai dan Ibnu Majjah dalam sebuah hadits panjang:

³⁷ Hafizh Dasuki, Dkk, *Alqur''a Dan Tafsirnya Jilid X*, Pt. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991, h. 392

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur''an dan Tafsirnya Jilid X*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991, h.209

قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أخذنا عليه قال
أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت

Artinya : Saya (Hakim) berkata : “Ya Rasul Allah SAW, apakah hak seorang istri atas suaminya? Nabi berkata “kamu mesti memberi makan sesuai dengan apa yang kamu makan dan memberi pakaian sesuai dengan apa yang kamu pakai.(Subul-al-salam :221)

Dari hadits di atas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa :

- a. Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan.
- b. Tidak menyakiti isteri seperti, tidak memukul wajah isterinya.
- c. Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan isterinya.

3. Syarat Istri Mendapatkan Nafkah

Istri dapat menerima nafkah dari suaminya di haruskan memenuhi beberapa syarat :

- a. Akadnya sah
- b. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya
- c. Istri kemungkinan besar dapat dinikmati dirinya oleh suaminya
- d. Istri tidak keberatan untuk pindah tempat, apabila suami menghendaknya, kecuali suami bermaksud jahat dengan bepergiannya itu atau membuat tidak aman terhadap istrinya, anak dan kekayaannya, atau di waktu melangsungkan pernikahan dia berjanji untuk tidak pindah dari rumah istrinya atau tidak akan pergi dengan istrinya.

- e. Suami istri masih mampu melakukakn kewajian suami istri.³⁹

Apabila persyaratan di atas tidak dapat dipenuhi oleh istri, maka suami tidak berhak memberikan nafkah kepada istrinya. Seorang istri tidak mendapatkan nafkah dari suaminya apabila :

- a. Istri masih kecil yang belum di campuri
- b. Rasulullah di kala menikah dengan aisyah, tidak membarikan nafkah selama dua tahun di karenakan beliau belum mengumpulkan aisyah
- c. Istri berpindah dari rumah suaminya ke rumah lain tanpa ada alasan syar'i atau pergi tanpa berpamitan kepada suaminya.
- d. Istri bekerja dan mempunyai usaha tetapi suami melarangnya
- e. Istri berpuasa sunah atau i'tikaf sunnah tanpa izin suaminya
- f. Istri melakukan kejahatan dan masuk penjara, atau karena tidak membayar hutangnya
- g. Istri di culik orang lain, sehingga berpindah dengan suaminya
- h. Istri nusyuz (durhaka) atau berbuat maksiat terhadap suaminya atau tidak mau meladeni suaminya.⁴⁰

4. Gugurnya Kewajiban Suami Memberi Nafkah

Pada dasarnya nafkah di wajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang bisa, dimana suami istri sama-sama melakukan kewajiban yang di tetapkan oleh

³⁹ Nasruddin, *Fiqih Munakahat (Hukum Perkawinan Berbasis Nash)*, 2017, h.76

⁴⁰ Nasruddin, *Op.Cit.*, 2011, h.77

agama tidak masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhaklah ia menerima hak yang sudah di tentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya berhaklah menerima nafkah dari suaminya, sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya, berhaklah menerima pelayanan dari istrinya: menjadi pembicaraan di kalangan ulama.

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajiban yang disebut dengan *Nushus*. Menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberikan nafkah dalam masa *nushus*-nya itu. Alasan jumhur ini adalah bahwa nafkah yang di terima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang di berikan kepada suaminya. Istri yang *nushus* hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas nafkah selama masa *nushus* itu dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nushus* itu berhenti.

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang *nushus* tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya adalah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak di dasarkan pada ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak mentaati suaminya atau *nushus*, suami dapat memberi pengajaran, atau pisah ranjang atau pukulan yang tidak menyakiti, sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلَّا فَضَّلَ اللَّهُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي

تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء : 34)

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Bila suami tidak menjalankan kewajiban dalam memberikan nafkah, istri berhak menarik ketaatannya dengan cara tidak mau di gauli suaminya. Jumhur ulama berpendapat bahwa istri yang tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, maka berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk membatalkan perkawinan atau *fasakh*.

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk di gauli. Istri harus sabar menerima kenyataan ketidakmampuan suaminya itu. Pandangan di atas dapat di sederhanakan bahwa hak istri mendapatkan nafkah menjadi gugur apabila :

- a. Bila ternyata akad nikah mereka batal atau *fasid*(rusak), seperti dikemudian hari ternyata suami istri itu mempunyai hubungan mahram dan sebagainya, maka istri wajib mengembalikan nafkah suami yang telah di berikan kepada istri jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan, maka pihak istri tidak wajib mengembalikannya.
- b. Istri masih belum baligh dan masih tetap di rumah orang tuanya. Menurut Abu Yusuf istri berhak menerima nafkah dari suaminya jika istri telah serumah dengan suaminya, karena dengan sunnah itu berarti istri telah terikat di rumah suaminya.
- c. Istri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Tetapi jika dia bersedia tinggal di rumah suaminya, tetap ia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya.
- d. Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari suami, bepergian tanpa izin suami dan tanpa disertai / *mahram*, dan sebagainya.
- e. Bila istri *nusyuz*, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri.

5. Sebab-sebab Yang Mewajibkan Nafkah

a. Sebab Pernikahan

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Allah SWT berfirman :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara makruf”. (QS. Al-Baqarah : 228)

Ayat diatas menjelaskan bahwa nafkah seorang isteri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hak-hak lainnya.⁴¹

b. Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Isteri Abu Sufyan pernah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata “Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya”? Beliau menjawab :

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994. h. 422

خُذْ مِنْ أَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَمَا يَكْفِي بَنِيكَ . متفق عليه

Artinya: “Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”. (H.R. Bukhari)⁴²

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua. Merujuk pendapat pemberian nafkah anak kepada orang tua menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i bahwa ketidakmampuan bekerja tidak merupakan syarat kewajiban memberikan nafkah kepada mereka. Sedangkan orang-orang lain selain ayah dan kakek yang sanggup bekerja, tidak ada kewajiban memberikan nafkah kepada mereka.

Luasnya cakupan dalam keturunannya sebagai objek nafkah harus dipahami dalam konteks yang relatif, yaitu menghendaki syarat kesanggupan pihak yang berkewajiban memberikan nafkah. Sehingga ketidakterpenuhan syarat itu akan menyebabkan tidak adanya tanggung jawab nafkah (tetapi ketiadaan tanggung itu tidak mempengaruhi haknya semisal hak waris), dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum lainnya.⁴³

⁴² Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006.

h. 308

⁴³ Erfani, *Implikasi nafkah dalam* h.6

6. Macam-macam Nafkah

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan berumahtangga, tidak harmonis kehidupan keluarga tanpa pangan, sandang dan papan. Hal yang telah di sepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib di penuhi suami sebagai nafkah adalah sandang, pangan dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti.

Jumhur ulama memasukan alat kebersihan dan wangi-wangian kedalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak bisa melkaukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayanan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya walaupun hanya seorang.

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokokseperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam :

- a. Nafkah Diri Sendiri Seseorang lebih mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rosulullah SAW:

إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ

Artinya: "Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada di bawah tanggung jawabmu". (HR. Muslim, Ahmad

*bin Hambal, Abu Daud, dan an Nasa'I dari Jabir bin Abdullah)*⁴⁴

b. Nafkah seseorang terhadap orang lain Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya nafkah :

- 1) Hubungan perkawinan
- 2) Hubungan kekerabatan
- 3) Hubungan Budak / Pelayan.⁴⁵

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Sebab kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.⁴⁶

7. Ukuran Nafkah

Berdasarkan pendapat jumhur yang status sosial ekonomi tidak termasuk kepada *kafaah* yang di perhitungkan, maka suami istri dalam suatu keluarga tidak mesti dalam status sosial yang sama. Dalam keadaan

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *fikih munakahat (buku II)*, Pustala Amani, Bandung, 2001, h.

⁴⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid ke-4, Ictiar Baru Van Hoeven*, Jakarta, 2009, h. 1281

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), Juz. 10, hlm. 94-95

ini menjadi perbincangan di kalangan ulama tentang ststus sosial-ekonomi siapa yang di jadikan standar ukuran nafkah .dalam hal ini ada tiga pendapat.

Pertama: pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang menjadikan standar ukuran nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial-ekonominya berbeda diambil standar menengah di antara keduanya yang menjadi pertimbangan dari pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan antara suami dan istri, oleh sebab itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.

Kedua: pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang menjadi standar ukuran nafkah adalah kebutuhan istri. Dasar dari ulama ini adalah Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة : 233)

Artinya: kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut.

Pengertian ma'ruf dalam ayat ini dipahami ulama golongan itu dengan arti mencukupi. Imam Syafi'I dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Selanjutnya ulama ini merinci kewajiban suami pada tiga tigitkan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua mud, 1 mud= 1 kati atau 800 gram). Kewajiban suami yang miskin adalah

satu mud, dan yang petengahan adalah satu setengah mud. Bila istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama dengan suaminya maka kewajiban suaminya adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian nafkah.⁴⁷

8. Tujuan dan Hikmah

Di antara disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, untuk mendapatkan ketenangan hidup, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Demikian bisa berjalan dengan baik bila di tunjang dengan tercukupinya nafkah atau kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafkah adalah untuk menegakkan tujuan dari perkawinan itu.

Dengan telah di penuhiya kebutuhan yang bersifat materi ini dan ditunjang pula dengan pemenuhan kebutuhan nonmateri, maka apa yang diharapkan dari perkawinan itu akan dapat di capai dengan izin Allah dan dengan itu juga tuntunan Allah untuk pendekatan diri kepada Allah dapat di laksanakan.

C. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan telaah dibeberapa penelitian sebelumnya ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang pertama, yang berhasil peneliti temukan adalah yang di lakukan oleh Novinda Amarti Astuti dengan judul “Implikasi Hukum

⁴⁷ Al-Nawawi, *al-majmu' Syarh al-Muhazzab*, Beirut, Dar al-Fikr, 1996, h.262

Mengabaikan Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Fiqih (Studi Kasus di Desa Demangan Siman Ponorogo)” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab suami mengabaikan nafkah terhadap istri dan bagaimana implikasi hukum mengabaikan nafkah terhadap isteri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Fiqh. Pengambilan data dilakukan dengan penelitian lapangan dengan melakukan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor alasan suami mengabaikan nafkah terhadap istri adalah *Pertama*, suami mengabaikan nafkah karena suami beranggapan jika istri bisa bekerja, maka suami tidak perlu lagi membiayai kebutuhan istri. *Kedua*, suami mempunyai watak yang kikir. *Ketiga*, karena istri *nushuz*. *Keempat*, faktor alasan lainnya dikarenakan banyaknya tanggungan sehingga hak nafkahnya menjadi terabaikan. *Kelima*, suami mengabaikan nafkah istrinya karena kurangnya rasa tanggung jawab atau malas untuk bekerja.

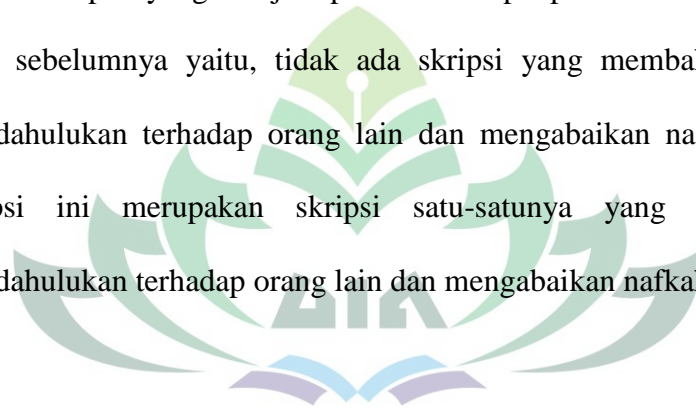
Penelitian yang Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Latif dengan judul “Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga ditinjau dari Hukum Islam” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga di Lembaga Permasyarakatan Kelas I kedungpane Semarang, dan bagaimana tinjauan menurut Hukum Islam tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami

sebagai narapidana terhadap keluarga. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) dan sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder. Penelitian ini juga menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat disimpulkan bahwa merujuk pada firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah, dan juga menurut Hukum Islam, maka upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana dalam memberi nafkah tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun penelitian Ketiga, yang penulis dapatkan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yusmardi dengan judul “Efektifitas Penyelesaian Nafkah Kadaluarsa (Taqadum) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam studi kasus di Kecamatan Bangkinang Seberang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas penyelesaian nafkah kadaluarsa, faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelesaian nafkah kadaluarsa dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian nafkah kadaluarsa di Kecamatan Bangkinang Seberang. Jenis penelitian ini penelitian lapangan dengan mengumpulkan data langsung dari sebagian masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang yang melakukan tuntutan nafkah dengan metode pengumpulan data observasi dan wawancara, kemudian penulis melakukan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa efektifitas penyelesaian nafkah kadaluarsa yang tidak ditunaikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya tidak diselesaikan di pengadilan agama karena

tidak ada undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga penyelesaian nya di lakukan dengan cara musyawarah tokoh agama. Faktornya yaitu seperti faktor ekonomi, faktor keengganan, dan faktor lainnya yang membuat suami tidak memberikan nafkah terhadap istri. Dalam Hukum Islam jika ayah atau suami menelantarkan kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya maka, suami atau ayah dapat dituntut ganti rugi nafkah istri dan anak, juga dapat diancam dengan hukuman ta'zir.

Adapun yang menjadi pembeda skripsi penulis dengan skripsi yang di teliti sebelumnya yaitu, tidak ada skripsi yang membahas tentang tindak mendahulukan terhadap orang lain dan mengabaikan nafkah istri sehingga skripsi ini merupakan skripsi satu-satunya yang membahas tindak mendahulukan terhadap orang lain dan mengabaikan nafkah istri.



DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2007

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Hidayah Surabaya, 1971

A. Buku

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid ke-4, Ictiar Baru Van Hoeven*, (Jakarta, 2009)

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005)

AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti 2004

Abdurrahman, "*Perkawinan Dalam Syariat Islam*", Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama Bahasa Tentang Pengajuan Perkara Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Edisi Pertama , 2014)

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014

Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih, Jilid I, Cetakan Pertama*, Jakarta: PT, Logos Wacana Islam, 1999

Ayyub Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 200

Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat I*, Bandung; Pustaka Setia, 2013

H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia cet.4* , Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008

Beni Ahmad Saebani, *fiqh munakahat (buku II)*, Pustala Amani, Bandung, 2001

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013

H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995

Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 Jakarta: Bulang Bintang, 1993

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

M.Hasan Ali, *Masail fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)

Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Grafindo Persada 1995)

Nur Taufiq Sanusi, *Fiqh Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmonis*, Depok: Elsas, 2011

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz VII, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1996

S.a Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1998

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016

Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press. 1986

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989

Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013

Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004

Tihami dan sahrani, Sohari, *Fiqih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuan di Kota Padang)*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002

Yayah Abdullah al- Khatib, *Ahkam al-Marah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fiqih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

B. Jurnal

Erfani, Implikasi nafkah dalam Kontruksi Hukum Keluarga, Jurnal, Desember, 2011

Ibnu Rozali, “Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam”, Jurnal Raden Fatah

Nasruddin, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Berbasis Nash)*, 2017

Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, Jurnal Studi Hukum

Syamsul Bahri “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam” Jurnal Ilmu Hukum, No.66, Th, XVII, Agustus 2015

C. Perundang- Undangan

Undang- undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan Kompilasi HuKum Islam, Bandung: Citra Umbara.2007

